

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2016. *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional Depdiknas. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Janedjri M. 2019. *Hukum Pemilu: Dinamika Sistem dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2022. *Demokrasi, Konstitusi, dan Pemilu: Menuju Sistem Politik yang Berintegritas*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pamuji, Kadar, dkk. 2023. *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Banguntapan: KBM Indonesia.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. 2022. *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Santoso, Topo & Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surbakti, Ramlan. 2021. *Menjaga Integritas Pemilu: Rekomendasi untuk Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Kemitraan.

Surbakti, Ramlan, dkk. 2020. *Penanganan Pelanggaran Pemilu Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*. Jakarta: Bawaslu RI.

Wiyanto, Roni. 2014. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Jurnal

Endrawati. 2019. *Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangkaraya*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2.

Hasanah, Siti & Sri Rejeki. 2021. *Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah*. Civicus, Vol. 9, No. 2.

Hastuti, Dwi & Wildan Rofikil Anwar. 2021. *Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19*. Ijlil, Vol. 3, No. 2.

Isra, Saldi, dkk. 2014. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3.

Octavia, Erna & Muhammad Anwar Rube'I. 2024. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak dalam menjalankan pengawasan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024*. Vol. 8, No. 2.

Saputra, Asbudi Dwi. 2020. *Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu*. Pleno Jure, Vol. 9, No. 2.

Turangan, Michella Kristenia A. 2019. *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Lex Administratum, Vol. VII, No. 1.

Skripsi

Maharani, Anisa. 2024. *Upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Umum*. 2024. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Website

Hukumonline. "Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Pelaksanaannya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi--lt61b739dbb5bf8/> diakses pada 13 Juli 2025.

KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. "4 Hal yang Membuat Asas Pemilu Harus Diterapkan". https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8115_4-hal-yang-membuat-asas-pemilu-harus-diterapkan-simak-apa-saja-itu diakses pada 30 November 2025.

RRI, Bawaslu Sumbar Tangani 58 Perkara Dugaan Pelanggaran Pilkada, <https://rri.co.id/pilkada-2024/1135446/bawaslu-sumbar-tangani-58-perkara-dugaan-pelanggaran-pilkada> diakses pada tanggal 14 januari 2024

